

Analisis Ketentuan Parkir Kendaraan di Ruang Jalan (Studi Kasus Jalan Mayor Abdurahman Sumedang)

¹Wanson Ropendi, ²Rian Nurhudin, ³Riky Rimansyah Putra, ⁴Obi Sobirin, ⁵Arif Rahman Sudrajat

¹²³⁴⁵STIA Sebelas April Sumedang

e-mail : ¹wansonropendi11@gmail.com, ²Riannurhudin@gmail.com,

³rikyrimansyah27@gmail.com

⁴obisobirin200@gmail.com, ⁵arip.rs84@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini ditulis berdasarkan permasalahan yang dialami oleh penulis ketika sedang berkendara di jalan Mayor Abdurahman, Kabupaten Sumedang. Dimana di jalan tersebut sering terjadi kemacetan dikarenakan banyaknya kendaraan yang parkir disepanjang bahu jalan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis juga mencoba menggambarkan secara detail situasi, keadaan, dan faktor faktor yang menyebabkan kemacetan di jalan Mayor Abdurahman, Kabupaten Sumedang. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi acuan sebagai upaya untuk memberikan rekomendasi terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang agar mengeluarkan Peraturan Daerah larangan parkir terhadap pengendara kendaraan untuk tidak parkir di sepanjang bahu jalan Mayor Abdurahman, Kabupaten Sumedang.

Kata Kunci: Parkir, Kemacetan, Ruang Jalan

Analysis of vehicle parking costs in road spaces (case study on the path of Mayor Abdurahman Sumedang)

Abstract

This research was written based on the problems experienced by the author while driving on the path of Major Abdurahman, Sumedang Regency. Where the road jams often occur due to the many vehicles parked along the shoulder of the road. In this study, the author also tries to describe in detail the situation, circumstances, and factors that cause congestion on the path of Major Abdurahman, Sumedang Regency. The author hopes this research can be a reference as an effort to provide recommendation to the Regional Government of Sumedang Regency to issue a Regional Regulation on parking bans for motorists not to park along the shoulder of Mayor Abdurahman, Sumedang Regency.

Keywords: parking, congestion, road

A. PENDAHULUAN

Parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara (Direktorat Perhubungan Darat, 1998). Perparkiran merupakan salah satu masalah yang sering dijumpai dalam hal transportasi, terutama dalam penyebab kemacetan yang sedang merajalela di berbagai kota besar yang ada di Indonesia. Banyak orang lebih memilih

parkir di bahu jalan dikarenakan lebih mudah dan lebih cepat untuk dilakukan. Namun demikian, penggunaan parkir di bahu jalan juga memiliki kekurangan bagi kelancaran lalu lintas disekitarnya. Kebutuhan akan ruang parkir merupakan hal yang penting dalam pusat kegiatan karena dapat menimbulkan masalah seperti kemacetan dan mengganggu terhadap kelancaran berlalu lintas. Kapasitas

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

parkir yang sesuai dan letak parkir yang digunakan dengan baik dan benar tentu tidak akan mengakibatkan penghambatan lalu lintas. Masalah yang terjadi di jalan Mayor Abdurahman, Kabupaten Sumedang adalah banyaknya masyarakat yang sudah terbiasa parkir di bahu jalan, jalan yang sempit menyulitkan pengendara lain untuk melewati jalan tersebut, dan banyaknya angkutan umum yang sering menaikkan penumpang di bahu jalan tersebut sehingga mudah terjadi kemacetan.

Sehubungan dengan adanya masalah tersebut, maka harus adanya suatu upaya yang bisa meminimalisir kemacetan tersebut. Maka dari itu penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana proses pengelolaan parkir disepanjang bahu jalan Mayor Abdurahman, Kabupaten Sumedang. Tujuannya yaitu untuk mengetahui cara atau tahapan cara pembuatan perda tentang berlalu lintas. Diharapkan manfaat dari ini yaitu memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk membuat larangan parkir di sepanjang bahu jalan Mayor Abdurahman Kabupaten Sumedang agar kemacetan yang ada di sepanjang jalan Mayor Abdurahman bisa di minimalisir.

B. PEMBAHASAN

Pada penelitian analisis terhadap pengelolaan parkir tepi jalan umum di jalan Mayor Abdurahman Kabupaten Sumedang ini, fokus penelitian ini adalah pengelolaan parkir tepi jalan umum di jalan Mayor Abdurahman serta pengaruhnya terhadap masyarakat Kabupaten Sumedang yang menggunakan jalan tersebut.

Oleh karena itu peneliti menggunakan teori Manajemen Pemerintahan oleh Samuel E. Overman mengenai penerapan fungsi manajemen dengan paradigma manajemen publik yang baru dipengaruhi beberapa aspek. Samuel E. Overman mengartikan manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti Planning, Organizing, dan Controlling di satu sisi, dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik di sisi lain, Samuel E. Overman dan G. David Garson pada tahun 1983 menggagas konsep manajemen publik baru dengan model PAFHRIER, menggeser paradigma manajemen publik lama. Adapun

penjabaran model PAFHRIER adalah sebagai berikut:

1. Policy Analysis

Merupakan pengembangan lanjut dari planning dan reporting. Seorang manajer dituntut mampu melakukan analisis kebijakan publik.

2. Financial Management

Adalah pengembangan dari budgeting. Manajer dituntut mampu mengatur anggaran.

3. Human Resources Management

Adalah pengembangan dari staffing. Manajer dituntut paling tidak memperhatikan 3 hal pokok,

Pertama, bagaimana memperoleh sumberdaya manusia dalam jumlah dan kualitas yang tepat.

Kedua, bagaimana meningkatkan kualitas kerja pegawai.

Ketiga, bagaimana pemimpin mengendalikan mereka sesuai dg tujuan organisasi.

4. Information Management

Adalah pengembangan dari reporting, directing, dan coordinating. Manajer dituntut mampu mengelola data dan informasi bagi kebutuhan

perencanaan, pengambilan keputusan, penilaian pekerjaan, sistem monitoring dan pengendalian.

5. External Relation

Merupakan fungsi baru. Manajer harus mampu menjaga hubungan luar atau dengan lingkungannya. manajemen pemerintahan menurut Samuel E. Overman dimana dalam suatu pengelolaan, terdapat aspek organisasi yang dalam hal ini bersangkutan dengan organisasi yang memiliki wewenang dalam pengelolaan parkir yang menjalankan fungsi-fungsi manajemen berupa perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian.

Dalam manajemen pemerintahan menurut Overman adanya aspek penentuan sumber daya yakni pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan perparkiran. Dalam hal aspek keuangan yaitu adanya target retribusi parkir yang masuk ke dalam PAD. Dalam hal aspek fisik dan informasi, pengelola perparkiran mengidentifikasi potensi-potensi titik parkir yang ada dan disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal aspek politik dimana dalam pengelolaan parkir yang terkadang menemui hambatan kepentingan dari lingkungan eksternal yakni kepentingan aktor informal.

Metodologi penelitian yang digunakan

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian campuran atau gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian campuran ini menggunakan pendekatan desain dominan-kurang dominan yang diungkapkan oleh Creswell yakni pendekatan ini menggunakan gabungan pada prosedur penelitian, tetapi salah satu metode lebih dominan terhadap metode yang lain dengan tipe penelitian deskriptif Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana realisasi pengelolaan parkir tepi jalan umum Mayor Abdurahman Kabupaten Sumedang. Bagaimana peran masing-masing pihak yang terlibat dalam pengelolaan parkir, dan hambatan apa saja yang mempengaruhi pengelolaan tersebut akan disoroti dalam penelitian ini. Adapun Objek Penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, Komisi B DPRD Kabupaten Sumedang, Juru Parkir, dan Pemilik Lahan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Menggunakan bentuk interview kurang terstruktur, dengan membuat interview guide berisikan topik-topik yang ditanyakan kemudian dielaborasi. Interview guide diturunkan dari logika berfikir yang dibangun dalam penelitian ini. Pemilihan responden dengan menggunakan teknik snowball effect. Mewawancarai responden pertama kemudian melakukan interview dengan responden lain yang berkaitan dengan responden pertama, dan seterusnya.

2. Observasi

Merupakan pengamatan secara langsung di lapangan terkait dengan pengelolaan perparkiran di jalan Mayor Abdurahman Kabupaten Sumedang oleh aktor formal yakni para juru parkir yang terdaftar dalam Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dan juga praktik parkir liar oleh aktor informal yakni para juru parkir yang tidak terdaftar. Pengamatan di lapangan ini guna melihat praktik parkir di kawasan perbelanjaan jalan Mayor Abdurahman Kabupaten Sumedang yang berjejer di sepanjang jalan utama. Selain itu pula dilakukan observasi kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang terkait kebijakan pengelolaan perparkiran yang seharusnya sesuai dengan peraturan daerah

yang berlaku.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang terdiri dari surat, memorandum, agenda, laporan-laporan suatu peristiwa, proposal, hasil penelitian, hasil evaluasi, kliping, artikel. Rekaman arsip yang terdiri dari rekaman layanan, data survei, dan daftar nama. Selain itu pula berisikan dokumentasi hasil observasi di lapangan dan perekaman hasil wawancara.

Manajemen atau pengelolaan parkir di dalam badan jalan (on street parking) merupakan hal penting untuk mengendalikan lalu lintas agar kemacetan dapat ditekan. Berikut adalah fungsi-fungsi manajemen yang dijalankan dalam proses pengelolaan parkir yang meliputi:

1. Perencanaan

Adapun pengelolaan parkir di Jalan Mayor Abdurahman saat ini memiliki dua tujuan utama yakni terkait dengan penyelenggaraan parkir yang efektif guna tercapainya ketertiban lalu lintas jalan dan tujuan lainnya adalah optimalnya penerimaan daerah dari sektor parkir tepi jalan umum ini yang akan masuk kedalam pos PAD. Tujuan pengelolaan parkir dijalankan melalui strategi kebijakan dimana Pemerintah Kabupaten Sumedang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan parkir dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi parkir tepi jalan umum.

2. Pengorganisasian

a. Penentuan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan parkir ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang selaku pelaksana kebijakan, DPRD Kabupaten Sumedang selaku partner. Juru Parkir selaku pengelola parkir di lapangan, dan Koordinator Lapangan selaku pemilik lahan.

b. Sosialisasi Kebijakan

Selanjutnya dilakukan sosialisasi kebijakan yang telah dihasilkan demi tercapainya suatu penyampaian komunikasi yang tepat sasaran dan tepat tujuan. Juru parkir (Jukir) dan Koordinator Lapangan (Korlap) kurang diberikan informasi kebijakan tentang Peraturan Daerah oleh Unit Pengelolaan Perparkiran. Kurang diberikan informasi tersebut terlihat dari adanya pertemuan sosialisasi tentang peraturan daerah parkir tepi

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

jalan umum tersebut kepada para Juru Parkir (Jukir) hanya berlangsung dua kali pada Maret 2004 dan Januari 2005 setelah diundangkan pada Februari 2004. Para juru parkir juga beranggapan bahwa sebagai akibat tidak memiliki buku peraturan mengenai peraturan perparkiran membuat para juru parkir tidak memiliki gambaran jelas terkait isi peraturan daerah tersebut. Terkait perubahan tarif parkir yang tertuang dalam Perda No.2 Tahun 2012 bahwa sosialisasi yang dilakukan Dishub Kabupaten Sumedang adalah hanya melalui karcis parkir yang diberikan kepada para juru parkir.

c. Mekanisme Penarikan Retribusi

Proses pemungutan retribusi adalah sebagai berikut: juru parkir memungut retribusi parkir di tempat mereka beroperasi, lalu pengumpul yang direkrut oleh Dishub akan menarik setoran dari juru parkir di kawasan operasi tersebut, kemudian pengumpul akan mensetor uang retribusi kepada bendahara dinas, dan akhirnya dari bendahara lalu disetor ke kas daerah. Kendala dalam proses penarikan retribusi adalah dimana setoran menyesuaikan dengan pendapatan juru parkir, waktu penarikan setoran yang kurang tepat, liburnya juru parkir yang menyesuaikan toko yang tutup dan faktor cuaca.

d. Praktek Perparkiran

Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang telah memberi rambu lalu lintas dan marka pada titik-titik jalan yang dilarang untuk aktivitas parkir. Banyaknya para juru parkir yang tidak mematuhi aturan rambu-rambu larangan parkir, banyaknya praktik parkir liar di beberapa titik larangan di kawasan Jalan Mayor Abdurahman Kabupaten Sumedang. Banyaknya para juru parkir yang menarik retribusi diatas tarif yang ditentukan, bahkan juru parkir yang tidak menyetorkan retribusi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang . Pengelolaan parkir di lapangan juga menemui kendala karena adanya kepentingan koordinator lapangan yang merasa memilikilahan parkir.

3. Pengendalian

Dalam melakukan pengendalian terhadap pengelolaan parkir agar tujuan pengelolaan dapat tercapai, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang bekerja sama dengan kepolisian dalam melakukan penindakan parkir liar

dimana para pelaku parkir liar ini akan mendapatkan sanksi penilangan dan denda, namun upaya pengendalian ini masih dianggap terlalu lemah sehingga tidak menimbulkan efek jera. Adapun untuk para juru parkir terdaftar yang tidak mengikuti prosedur perparkiran hanya dikenakan sanksi berupa ancaman pencabutan izin parkir setelah mendapat surat peringatan. Hal ini nyatanya kurang berjalan efektif karena pengawasan yang belum maksimal oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.

3.2 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pengelolaan Parkir di Kawasan Jalan Mayor Abdurahman. Dalam proses pengimplementasian kebijakan parkir tepi jalan umum, adapun pihak-pihak yang berperan diantaranya adalah:

a. Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang sebagai SKPD yang menaungi urusan perparkiran dan mengatur jalannya kebijakan pengelolaan parkir yang menemui hambatan berupa tidak tertibnya para juru parkir dan menemui kendala kepentingan dengan para pemilik lahan.

b. Komisi B DPRD Kabupaten Sumedang sebagai pemegang fungsi check and balances dalam formasi kelembagaan pemerintah yang melakukan evaluasi RAPBD untuk kemudian disetujui dalam APBD dan fungsi pengawasan kebijakan.

c. Juru parkir yang melaksanakan praktek perparkiran di lapangan. Dimana terdapat aturan dan prosedur mengenai pengelolaan parkir tepi jalan umum bagi para juru parkir tersebut yang dimana dalam pengelolaan di lapangan banyak menemui hambatan dimana komunikasi dan arahan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang yang kurang intensif, dan juga kepentingan para pemilik lahan parkir membuat para juru parkir merasa hanya perlu memberikan setoran kepada para pemilik lahan ini dan juga perilaku para juru parkir yang tidak tertib.

- Koordinator lapangan atau juga dapat disebut pemilik lahan merupakan aktor di luar sistem yang terkadang merasa berkuasa atas suatu lahan parkir sehingga membuat para juru parkir memberikan setoran kepada para pemilik lahan ini. Para koordinator lapangan ini juga merasa kepentingan mereka tidak terkoordinir dalam pengaturan mengenai pengelolaan perparkiran

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

sehingga menyebabkan adanya perlawanan kepada pengaturan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.

Faktor-Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Perparkiran di Jalan Mayor Abdurahman Kabupaten Sumedang

1. Peraturan: Perda Parkir yang belum mengakomodasi kepentingan semua pihak dan belum adanya kewajiban dan hak juru parkir.
2. Tujuan Ketertiban: belum tersedianya Perda LLAJ yang spesifik tentang hukuman bagi para pelaku parkir liar, masih minimnya denda parkir sehingga kurang memberikan efek jera, kewenangan penilangan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang yang masih terbatas, kurangnya penyediaan kantong parkir off street, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memarkirkan kendaraannya pada kantong parkir yang telah disediakan.
3. Tujuan Penerimaan Daerah: pemilik lahan parkir yang belum dapat diajak berkoordinasi, masih adanya titik parkir yang belum tertangani, terdapat baking oknum tertentu pada kegiatan parkir liar, setoran retribusi parkir yang bergantung pada cuaca dan bervariasinya jumlah potensi titik parkir.
4. Pelaksana parkir di lapangan: beragamnya usia dan latar pendidikan membuat sosialisasi kebijakan menjadi sulit dalam proses

penerjemahannya, kurangnya pembinaan teknis kepada para juru parkir, selain itu juga adanya tekanan dari pihak lain yakni kinerja yang masih bergantung pada pemilik lahan, setoran retribusi masih bergantung cuaca, dan proses penggantian juru parkir nakal yang tidak mudah.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Dari pembahasan yang telah dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa parkir yang ada di jalan Mayor Abdurahman Kabupaten Sumedang berjalan dengan baik walaupun ada beberapa catatan yang harus diperbaiki oleh pemerintah terkait.

Saran dari peneliti yaitu pemerintah Kabupaten Sumedang harus mengevaluasi perparkiran yang ada di jalan Mayor Abdurahman dikarenakan kendaraan yang parkir di jalan tersebut semakin hari semakin banyak.

REFERENSI

- Keban, Yermias. T. 2014. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu. Yogyakarta: Gava Media
- Herujito, Yayat. M. 2001. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: PT Grasindo